

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari konteks Hubungan Internasional yang lebih luas, Myanmar merupakan negara terbesar di perbatasan Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Adanya suatu masalah yang terjadi di Myanmar kemudian tidak hanya menjadi suatu masalah domestik nasional saja karena dapat menjadi suatu masalah penting dalam Hubungan Internasional.<sup>1</sup> Agar pembahasan latar belakang masalah ini dapat lebih teratur dan mendalam, penulis coba membahas dengan memulai pembahasan dari kudeta oleh rezim junta militer sampai pelaksanaan pemilu 2010 yang pada akhirnya membawa rakyat Myanmar kepada sistem pemerintahan demokratis.

Sejarah transisi demokratisasi di Myanmar secara kronologis dapat dirunut pada fase pertama, Burma mendapatkan kemerdekaannya dari kolonialisme Inggris Raya pada tanggal 4 Januari 1948 melalui sebuah kesepakatan damai dengan kaum nasionalis Burma yang dipimpin oleh Thaksin Nu.<sup>2</sup> Sebelumnya, gerakan pembebasan Burma dipimpin oleh Jendral Aung San (ayah Aung San Su Kyi), namun Aung San dibunuh oleh lawan politiknya karena dituduh berkhianat dengan melakukan kesepakatan dengan pemerintahan kolonialisme Inggris Raya

---

<sup>1</sup> Josef Selverstein, "Myanmar's (Burma's) Six domestic Challenges in the 1990s", diedit oleh Rohana Machmoed dan Hans-Joachim Esderts, *Myanmar and the Wider Southeast Asia*, (KL:ISIS, 1991). Hal: 22.

<sup>2</sup> "Sekelumit Dibalik Kegagalan Gerakan Demokrasi Myanmar", <http://www.berpolitik.com/viewposting.pl?newsid=249&param=wNTFXn6lpckI57BJGwi>, diakses tanggal 09 Februari 2012.

dalam proses kemerdekaan Burma. Setelah kematian Aung San, gerakan pembebasan Burma digantikan oleh U Nu, sementara saat itu juga kubu militer berganti kepemimpinan pada Ne Win. Kemerdekaan Burma pada tahun 1948 dipimpin oleh U Nu.

Negara baru yang terbentuk berdiri dengan nama Republic Union of Burma atau Republik Persatuan Burma (kemudian berganti nama Myanmar) dengan sistem pemerintahan berbentuk federasi berbasis etnis yang terdiri dari Pemerintahan (etnis) Shan, Kachin, Karenni dan Pemerintahan Pusat.<sup>3</sup> Pada tahun 1949, terjadi pertengkaran sengit dalam gerakan pembebasan Burma (AFPFL) antara kelompok sosialis dengan U Nu. Kepemimpinan U Nu diwarnai dengan berbagai aksi pemberontakan oleh etnis minoritas. Karna hal itu, militer mengambil bagian dalam langkah meredam pemberontakan etnis-etnis tersebut. Dan pada tahun 1958, militer berjanji akan melaksanakan pemilu yang bebas dan jujur. Namun hal tersebut hanyalah janji manis militer yang tidak direalisasikan, bahkan pada tahun militer dipimpin Jenderal Ne Win melakukan kudeta kepada pemerintah pada tahun 1962.

Kemudian fase kedua sejak junta militer Jenderal Ne Win yang berasal dari angkatan udara melakukan kudeta dan berkuasa menduduki pemerintahan pada tahun 1962 dengan menerapkan praktek pemerintahan diktator militer yang tertutup dari dunia luar dan melakukan privatisasi dalam berbagai aspek pemerintahan.

Sejak pemerintahan junta militer berkuasa melalui langkah kudeta pada 1962 oleh Jenderal Ne Win, pemerintahan di Myanmar sontak berubah. Dengan pemerintahan yang dipimpin oleh junta militer ini, negeri Myanmar pun semakin sulit untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Masyarakat hanya dapat merasakan pemerintahan yang

---

<sup>3</sup> Ibid.

demokratis dalam tatanan sistem pemerintahan selama 14 tahun, semenjak Myanmar mendapat kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948 hingga tahun 1962 melalui kudeta oleh rezim junta militer pada saat itu. Hanya selama rentang waktu singkat 14 tahun itulah, rakyat Myanmar dapat merasakan sistem pemerintahan konstitusi negara yang demokratis. Setelah 14 tahun merasakan sistem konstitusi negara, mimpi buruk rakyat Myanmar kembali datang dengan sistem pemerintahan otoriter bertangan besi yang kemudian menginjak hak-hak asasi rakyat Myanmar.<sup>4</sup>

Semenjak terjadinya kudeta, rezim militer praktis memegang dan mengambil alih seluruh aspek yang ada di Myanmar baik dalam penguasaan aspek politik maupun dalam aspek ekonomi. Segala usaha perekonomian dikuasai oleh junta militer yang dimulai dengan pengambil-alihan pengelolaan aset-aset koloni Inggris, seperti perusahaan pelayaran, perkebunan, gedung dan beragam industri lainnya. Pemerintah junta melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Rezim junta militer juga memiliki hak tanpa batas untuk mempekerjakan rakyat dengan upah minimum untuk kepentingan bisnis kelompok tersebut.

Setelah berhasil melakukan kudeta pada 1962 di bawah komando Jenderal Ne Win, Junta Militer menunjukkan sikap tidak senangnya terhadap pihak asing yang bisa merongrong budaya, bahasa, tradisi dan agama bangsa Myanmar. Untuk itu Junta Militer mengusir kelompok pedagang imigran Cina dan India yang merupakan penggerak ekonomi negeri Myanmar itu sendiri. Alasannya sederhana, hanya sosialisme yang akan membebaskan ketergantungan ekonomi dari negara maupun bangsa lain namun terbukti di kemudian hari langkah ini salah total.

---

<sup>4</sup> Ibid.

Pada 1987, Myanmar oleh PBB dikategorikan salah satu dari 10 negara terbelakang di dunia.<sup>5</sup> Pemerintahan diktator oleh Jendral New Win mendapat benturan, baik protes hingga demonstrasi dari kalangan masyarakat sipil Myanmar. Sampai pada dampak dari kegagalan praktek diktator tersebut, pada tahun 1988 terjadi demonstrasi besar-besaran sebagai respon terhadap ketidakpuasan masyarakat Myanmar terhadap pemerintahan rezim militer yang menewaskan lebih dari 3.000 orang sipil, mengakibatkan Jenderal Ne Win mengundurkan diri dari pemerintahan digantikan oleh Jendral Sein Lwin.<sup>6</sup> Kemudian pergantian pemimpin selanjutnya kepada Jendral Saw Maung, dan mendirikan State Law & Order Restoration Council (SLORC).

Fase ketiga pasca pengunduran diri Jenderal Ne Win pada 1988, dibawah pemerintahan SLORC, Myanmar semakin dekat dengan praktek-praktek junta militer. Pasukan militer ditambah berlipat-lipat dan dimodernisasi. Bahkan Myanmar disebut-sebut memiliki kekuatan militer kedua setelah Vietnam di Asia Tenggara. Berangkat dari kekuatan yang dimilikinya, SLORC menjadi semakin kuat melakukan represi melawan pihak yang posisi. Upaya modernisasi militer tersebut juga dibarengi oleh upaya membuka diri terhadap dunia luar. Hal ini terlihat dari adanya program Visit Myanmar Year tahun 1996.<sup>7</sup> Jenderal Saw Maung mendirikan SLORC dan kemudian memberikan kesempatan pada partai politik untuk berkembang sehingga tidak ada lagi sistem partai politik tunggal. Dan pada tahun 1989 dibawah kepemimpinan Saw Maung, Burma berganti nama menjadi Myanmar. Disinilah mulai terlihat sedikit terjadinya pergeseran cara pandang pemimpin elite junta militer Jenderal Saw Maung yang, dimana

---

<sup>5</sup> "Sejarah Asia Tenggara-Myanmar", <http://ocyclep.blogspot.com/2011/04/sejarah-asia-tenggara-myanmar.html?zx=987985c0f5db7d7c>, diakses pada 17 November 2012.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Mikael, Gravers, *"Nationalism As Political Paranoia In Burma, An Essay on the Historical Practice of Power"*, (New York: Nordic Institute of Asian Studies Madison Avenue, 1999) hal. 139, 270.

membuktikan bahwa dalam penggunaan teori Samuel P. Huntington termasuk dalam proses demokratisasi berupa Transformasi (Reforma) walau masih tersamar.

Pada tanggal 27 Mei 1990, SLORC melaksanakan pemilu untuk pertama kalinya dan dimenangkan oleh National League for Democracy (NLD), partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. NLD memperoleh 59,9 persen popular vote dan 392 dari 485 kursi yang diperebutkan. Semetara itu, partai milik pemerintah, National Unity Party (NUP) hanya mendapatkan 21,2 persen popular vote dan 10 kursi.<sup>8</sup> Namun secara sepihak, militer membekukan parlemen bentukan pemilu dan Suu Kyi pun ditangkap dan ditahan. Pemerintahan lalu dijalankan kembali oleh pemerintahan SLORC tanpa mempedulikan hasil pemilu yang telah dilakukan. Era pasca pemilu ditandai dengan berbagai upaya represi yang semakin *intens* terhadap oposisi.<sup>9</sup> Kemudian Saw Maung mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1993 dan digantikan oleh Jenderal Than Shwe.

Namun tidak selamanya suatu gerakan menuntut pemindahan kekuasaan segera dari rezim militer ke sipil selalu merupakan suatu langkah politik yang cukup strategis dan efektif. Salah satu buktinya adalah gerakan yang dilancarkan oleh kelompok oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) pimpinan Aung San Suu Kyi yang menuntut pergantian pemerintahan Rezim Militer Myanmar di bawah kepemimpinan Jenderal Than Shwe.<sup>10</sup> Gerakan yang dilakukan oleh kelompok oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) pimpinan Aung San Suu Kyi yang menuntut pergantian pemerintahan Rezim Militer Myanmar di bawah kepemimpinan Jenderal Than Shwe menuai benturan fisik frontal dari junta militer yang berusaha meredam bahkan

---

<sup>8</sup> "Myanmar kecam ASEAN", <http://international.okezone.com/read/2009/05/26/18/223042/18>, diakses tanggal 09 Februari 2012.

<sup>9</sup> "Sekelumit Dibalik Kegagalan Gerakan Demokrasi Myanmar", <http://www.berpolitik.com/viewposting.pl?>, diakses tanggal 09 Februari 2012.

<sup>10</sup> Hendrajit, "Aksi Destabilisasi di Myanmar", 7 Oktober 2007, [http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news\\_view&news\\_id=10453](http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=10453) diakses tanggal 27 Januari 2012.

mengekang segala macam bentuk pergerakan yang bersifat mengancam keamanan *status quo* mereka yang telah berdiri sekian lama. Semakin mengemuka suatu gerakan kelompok oposisi LND untuk memperjuangkan pemerintahan yang demokratis, justru semakin kuat pula pemerintahan rezim militer Myanmar dengan cara Junta Militer membungkam aksi demonstrasi damai dengan tindakan kekerasan yang berujung pada korban cedera bahkan tewas.

Setelah peristiwa ditahannya Aung San Suu Kyi, dan junta kembali memimpin pemerintahan, dampaknya Myanmar tidak hanya terjerumus dalam sistem pemerintahan yang otoriter, tapi juga mendapatkan sanksi politik dan ekonomi dari komunitas internasional, khususnya dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Junta Militer pimpinan Jendral Than Shwe berusaha melanggengkan pemerintahan militernya, demi kepentingan utama agar rezimnya tetap berkuasa. Proses demokratisasi di Myanmar pun tak serta-merta berjalan lancar saat itu, menjadi suatu fenomena yang kerap kali terjadi dalam sebuah proses transisi sistem politik suatu negara dimana gerakan menuntut pemindahan kekuasaan segera dari rezim militer ke sipil selalu terbentur oleh kekuatan rezim militer tersebut yang berusaha keras untuk tetap mempertahankan *status quo* yang telah mereka bangun dari sekian lama.

Pada tahun 1997, pemerintah SLORC berubah nama menjadi State Peace and Development Council (SPDC). Dan di bulan Juli pada tahun yang sama, Myanmar ikut bergabung dalam organisasi regional Asia Tenggara, ASEAN. Menurut beberapa pengamat, keikutsertaan Myanmar dalam ASEAN adalah sebagai bentuk usaha pencarian legitimasi regional yang didukung oleh Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad. Mengingat sebenarnya pada tahun 1967 Myanmar pernah diundang dalam pertemuan perencanaan ASEAN yang pertama, namun Myanmar menolaknya dengan berdasarkan anggapan bahwa ASEAN

merupakan sebuah praktek organisasi imperialis.<sup>11</sup> Rezim militer Myanmar terus menjalankan roda pemerintahan tanpa adanya pemberontakan yang signifikan dengan ditahannya Aung San Suu Kyi menjadi tahanan rumah, dan segala sesuatu yang terjadi padanya wajib melapor kepada junta militer saat itu.

Gelombang protes, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1988, terjadi lagi di Myanmar pada tahun 2007. Protes gelombang kedua dimotori oleh para biksu Budha di Myanmar. Pada awalnya para biksu menolak sumbangan makanan dari para jendral penguasa dan keluarganya, penolakan ini menjadi simbol bahwa para biksu tidak lagi mau merestui kelakuan para penguasa militer Myanmar. Aksi demo juga dipicu oleh naiknya harga BBM beberapa ratus persen akibat dicabutnya subsidi. Demo melibatkan ribuan bikshu kemudian meletus diberbagai kota di Myanmar, para warga sipil akhirnya juga banyak yang mengikuti. Pemerintah Junta Militer melakukan aksi kekerasan dalam membubarkan demo-demo besar ini, Pagoda-pagoda disegel, para demonstran ditahan, dan senjata digunakan untuk membubarkan massa. Banyak biksu ditahan, beberapa diyakini disiksa dan meninggal dunia.<sup>12</sup>

Semula aksi demonstrasi yang dimulai pada Agustus 2007 ini berjalan dengan secara damai. Namun, demonstrasi ini berubah menjadi tragedi berdarah. Demonstrasi ini diikuti oleh 100.000 orang dan 20.000 orang diantaranya merupakan biksu. Tanggal 26 September 2007 militer memukul, melontarkan gas air mata, dan melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan biksu dan warga sipil di Yangon. Dalam peristiwa ini setidaknya 4 orang yang termasuk 3 orang biksu tewas dan 100 orang cedera. Sejak Junta bertindak keras kepada demonstran dalam tiga hari terakhir (dikutip 27 Januari 2012), setidaknya 13 orang tewas dalam

---

<sup>11</sup> <http://www.isis.org.my/files/apr/22nd%20APR/09%20Kavi%20Chongkittavorn.pdf>.

<sup>12</sup> "Islam di Myanmar", <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/islam-di-myanmar/>, diakses 17 November 2012.

peristiwa tersebut termasuk seorang wartawan kantor berita APF News Jepang Kenji Nagai dan ini memicu kekhawatiran akan terjadi aksi berdarah seperti yang terjadi pada tahun 1988 yang menewaskan 3.000 demonstran.<sup>13</sup>

Dalam perkembangannya, tidak ada perubahan sama sekali dalam konteks demokratisasi dan hak asasi manusia (HAM) di Myanmar setelah bergabung dalam ASEAN. Menurut PBB, kekerasan yang dilakukan pemerintahan junta militer Myanmar bahkan telah menyebar menjadi isu transnasional. Hal ini terkait dengan arus pengungsian yang besar dan kontinyu masyarakat sipil Myanmar menuju negara-negara tetangga, seperti Thailand, Bangladesh dan India. Data statistik PBB menunjukkan sedikitnya sebanyak 688.500 orang terlibat dalam pengungsian masalah tersebut.<sup>14</sup>

Fase keempat, pada pasca pemilu 1990 perubahan nama menjadi pemerintahan SDPC Junta militer terus berkuasa hingga akhir tahun 2010 di bulan November. Pada februari 2008 pemerintah melalui SPDC mengumumkan akan mengadakan Pemilu pada tahun 2010 dengan sistem multi partai. Langkah SPDC yang dipimpin oleh Than Shwe untuk mengadakan pemilu pada tahun 2010 ini melewati proses negosiasi kepada kalangan oposisi Myanmar yaitu pimpinan NLD Aung San Suu Kyi, dan rakyat maupun biksu Myanmar yang menjadi symbol kekuatan moral Myanmar itu sendiri. Adapun negosiasi yang dilakukan junta militer terhadap pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi diantaranya ialah mencari jalan solusi terhadap permasalahan kemerosotan ekonomi yang dialami Myanmar saat itu. Hal inilah yang jelas terlihat dan menjelaskan sesuai dengan teori transisi demokrasi karya Samuel P. Huntington bahwa dalam proses transisi demokratisasi di Myanmar, elite yang berkuasa saat itulah yang

---

<sup>13</sup> KOMPAS, "*Junta Tembaki Pemrotes*", dikutip 27 Januari 2012.

<sup>14</sup> Ibid.



mempelopori negosiasi dengan berbagai elemen masyarakat dan memelopori terwujudnya demokrasi dalam hal ini terwujudnya pemilu pada akhir tahun 2010 yang secara sah terpilihnya Thein Sein menjadi pemimpin rezim baru Myanmar yang demokratis sebagai langkah awal transisi dari runtuhnya pemerintah tangan besi junta militer menuju kebangkitan pemerintahan demokrasi di Myanmar yang demokratis.. Menyusul kemudian, dibebaskannya tokoh penting NLD Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah.

Dari rentetan perkembangan fase-fase transisi demokratisasi di atas, dapat kita pahami bahwa terdapat tiga (3) variabel internal yang mengarah pada krisis ekonomi domestik, instabilitas politik nasional serta pergeseran cara pandang pemimpin elite politik dalam masa kepemimpinan junta militer. *Pertama*, situasi ekonomi politik domestik Myanmar yang terus merosot dan jauh dari kriteria stabil. Suatu negara dalam proses menuju transisi dari pemerintahan rezim militer menuju pemerintahan yang demokratis memang sering kali diwarnai oleh tindak kekerasan bahkan pembunuhan massal seperti yang terjadi di Myanmar pada tahun 1988 dan 2007. Pembunuhan massal yang terjadi pada tahun 1988 dan 2007 ini nyata dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Myanmar sebagai langkah protes terhadap ketidakmampuan junta militer dalam menjaga kestabilan perekonomian Myanmar itu sendiri.

*Kedua*, variabel yang sangat merangsang kemudian adalah variabel horizontal berupa konflik yang terjadi antara etnis dalam negara Myanmar, dan variabel vertikal berupa konflik antara pihak pemerintah otoriter Myanmar dengan pihak oposisi yaitu LND dibantu LSM, golongan terpelajar, masyarakat sipil partisipan dan biksu Myanmar yang tertekan oleh rezim tangan besi junta militer. *Ketiga*, variabel pergeseran cara pandang pemimpin elite politik pada masa kepemimpinan junta militer yang sangat jelas terlihat terutama pada kepemimpinan Jenderal Saw Maung, berlanjut pada kepemimpinan Jenderal Than Shwe yang membuka berbagai

cara dalam jalan negosiasi terhadap berbagai elemen baik pihak oposisi NLD, rakyat, maupun biksu.

Faktor-faktor atau variable-variabel internal diatas inilah yang sangat berperan penting dalam mendorong proses transisi demokrasi suatu negara. Terbukti sikap pemerintah junta militer Myanmar sesuai dengan janji, pada akhir tahun 2010 pelaksanaan pemilu ke-2 dilakukan dan secara sah terpilihnya Thein Sein yang sebelumnya menjabat perdana menteri pada rezim militer menjadi pemimpin rezim baru demokrasi Myanmar, sebagai langkah awal dari harapan transisi runtuhnya pemerintah tangan besi rezim militer menuju kebangkitan pemerintahan demokrasi di Myanmar yang demokratis. Pada pemilu tersebut telah menghantarkan Myanmar pada perubahan-perubahan yang signifikan, dalam bentuk dibebaskannya tokoh penting NLD Aung San Suu Kyi dan terpilihnya Myanmar sebagai ketua ASEAN pada 2014.

## **B. Rumusan Masalah**

Faktor-faktor internal apakah yang mendorong proses transisi demokrasi di Myanmar Tahun 2010 ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Membuka wawasan dalam kemampuan analisis persoalan politik internasional terutama dalam wacana proses transisi demokratisasi di Myanmar berlangsung.

2. Menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan praktek yang terjadi di dunia politik internasional, terutama fenomena proses transisi demokratisasi di Myanmar berlangsung.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **D. Kerangka Dasar Berfikir**

### **Transisi Demokrasi**

Penulis menggunakan konsep transisi demokrasi karya Samuel P. Huntington dalam penulisan skripsi ini karena menurut penulis konsep transisi demokrasi sangat sesuai dan relevan dalam menjelaskan bagaimana proses transisi demokrasi di Myanmar berlangsung, dan kemudian melalui kerangka konsep ini pula penulis mencoba menganalisa faktor-faktor apa yang mendorong dan mempengaruhi transisi demokrasi di Myanmar hingga dapat terwujud saat ini.

Demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan awalnya berasal dari para filsuf Yunani. Konsep demokrasi sendiri dalam perkembangannya menjadi konsep yang paling ideal bagi sistem pemerintahan di suatu negara, karena dianggap lebih mengutamakan persamaan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme. Secara umum demokrasi dapat dipahami sebagai “*The Governmentor Rule by the People*”, artinya rakyat yang berkuasa.<sup>15</sup> Menurut

---

<sup>15</sup> Robert A. Dahl, “*Demokrasi dan Para Pengritiknya, Jilid 1*”, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992).

Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*Government of the people, by the people, for the people*).<sup>16</sup>

Demokratisasi merupakan suatu proses menuju demokrasi dan didefinisikan sebagai proses pergantian dari struktur politik otoriter menjadi sistem politik yang kedaulatannya meluas dan dipraktekkan oleh rakyat.<sup>17</sup> Demokratisasi mengarah pada proses pergeseran dari pemerintah otoriter menuju pemerintah demokratis melewati sebuah alur yang kompleks, bersifat jangka panjang dan melibatkan sejumlah tahapan, termasuk transisi yang sedang berlangsung sebagai bagian awal dari proses tersebut.

Demokrasi adalah sistem politik yang dapat menciptakan harmoni, baik di dalam maupun di luar negeri. Demokrasi dapat menciptakan harmoni di dalam negeri sebab rakyat ditempatkan sebagai poros politik. Tujuan demokratisasi adalah menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berpolitik. Ciri utama proses demokratisasi ialah terjadinya pergeseran dari rezim otoriter yang membangun sistem hegemonik tertutup yang tidak memberi ruang partisipasi publik ke arah sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis.

Secara sistemik, transisi demokrasi menjadi keniscayaan yang ingin dicapai dalam suatu masyarakat negara untuk mengakhiri rezim otoriter berkuasa yang mengesampingkan hak-hak warga negara, menegakkan sistem tiraninya tanpa member ruang dan melibatkan masyarakat negara secara terbuka menuju pemerintahan yang menjunjung tinggi suara rakyat, sistem politik yang terbuka serta menempatkan hak asasi manusia di tempat yang sama. Dengan kata lain, transisi demokrasi ini muncul karena adanya suatu pengaruh rezim otoriter oleh penguasa yang

---

<sup>16</sup> Masdar Umbarudin, "*Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

<sup>17</sup> Gramae Gill, "*Liberalization and Democratization in The Union and Russia, Democratization, Vol.2 No. 3*", (Autumn, 1995) hal. 315.

memiliki kekuatan besar(militer) menancapkan pengaruhnya secara dominan tanpa menghiraukan harmoni antara pemerintah dan masyarakat negara.

Dalam situasi rezim otoriter, kecenderungan pemerintah yang sedang berkuasa menunjukkan eksistensi kualitas kekuatannya kepada masyarakat adalah melalui instrumen militer. Dimana kekuatan militer cenderung ditonjolkan untuk membendung setiap perlawanan yang muncul sebagai respon dari sistem pemerintahan yang berkuasa dengan sewenang-wenang. Faktor kekuatan junta militer menjadi poin signifikan yang memisahkan perbedaan kekuatan otoriter pemerintah dan kekuatan masyarakat yang pro-demokrasi. Yang terjadi kemudian adalah jatuhnya banyak korban dari masyarakat sipil sebagai akibat dari benturan vertikal yang tidak sepadan.

Sebuah tanda dimulainya masa transisi adalah ketika pemerintahan otoriter dengan alasan apapun mulai memodifikasi peraturan-peraturan mereka sendiri sebagai jaminan yang lebih kuat bagi hak-hak individu dan kelompok, proses tersebut disebut liberalisasi.<sup>18</sup> Menurut Samuel P. Huntington, proses demokratisasi dari rezim non-demokratis ke sistem politik yang lebih demokratis terbagi dalam beberapa proses, meliputi :

1. Transformasi (Reforma) yaitu proses demokratisasi terjadi ketika elit yang berkuasa melakukan negosiasi dan memelopori perwujudan demokrasi.
2. Replacement (Ruptura) yaitu proses demokrasi terjadi ketika kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokratisasi dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan.

---

<sup>18</sup> George Sorensen, *“Demokrasi dan Demokratisasi, Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hal. 108.

3. Transplacement (Ruptforma) yaitu proses demokratisasi terjadi jika demokratisasi merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintahan dan kelompok oposisi.
4. Intervensi yakni proses demokratisasi yang dipaksakan oleh kekuatan asing dengan menumbangkan rezim otoriter yang sedang berkuasa.<sup>19</sup>

Hal-hal yang berkaitan dengan sosial ekonomi yang kemudian menjadikan salah-satu prakondisi mendorong terjadinya proses transisi menuju demokratisasi di Myanmar. Dinamika kehidupan ekonomi dan politik masyarakat Myanmar secara umum berpengaruh pada proses transisi demokratisasi itu sendiri. Masyarakat Myanmar saat itu merasa tidak puas terhadap perkembangan kondisi politik dan ekonomi yang semakin memburuk. Masyarakat Myanmar selama itu juga gencar melakukan demonstrasi besar-besaran yang mendapatkan dukungan dari kelompok oposisi Liga Nasional Demokrasi / LND (The National League for Democracy/ NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi menjadi tokoh utama dalam partai tersebut. Pergeseran cara pandang pemimpin elite politik pada masa kepemimpinan junta militer yang sangat jelas terlihat terutama pada kepemimpinan Jenderal Saw Maung, berlanjut pada kepemimpinan Jenderal Than Shwe yang membuka berbagai cara dalam jalan negosiasi terhadap berbagai elemen baik pihak oposisi NLD, rakyat, maupun biksu.

Secara kronologis, pergeseran cara pandang pemimpin elite politik kepada arah sedikit “lunak” dan terbuka dimulai pada kepemimpinan Jenderal Saw Maung dimana mendirikan SLORC dan kemudian memberikan kesempatan pada partai politik untuk berkembang sehingga tidak ada lagi sistem partai politik tunggal. Disinilah mulai terlihat sedikit terjadinya pergeseran cara pandang pemimpin elite junta militer Jenderal Saw Maung, dimana membuktikan bahwa

---

<sup>19</sup> Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*, (Norman: University of Oklahoma Press, 1993), hal. 147.

dalam penggunaan teori Samuel P. Huntington termasuk dalam proses demokratisasi berupa Transformasi (Reforma) walau masih tersamar.

Kemudian Saw Maung mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1993 dan digantikan oleh Jenderal Than Shwe. Pada tahun 1997, pemerintah SLORC berubah nama menjadi State Peace and Development Council (SPDC). Dan di bulan Juli pada tahun yang sama, Myanmar ikut bergabung dalam organisasi regional Asia Tenggara, ASEAN. Rezim militer Myanmar terus menjalankan roda pemerintahan tanpa adanya pemberontakan yang signifikan dengan ditahannya Aung San Suu Kyi menjadi tahanan rumah.

Pada Februari 2008 pemerintah melalui SPDC mengumumkan akan mengadakan Pemilu pada tahun 2010 dengan sistem multi partai. Langkah SPDC yang dipimpin oleh Than Shwe untuk mengadakan pemilu pada tahun 2010 ini melewati proses negosiasi kepada kalangan oposisi Myanmar yaitu pimpinan NLD Aung San Suu Kyi, dan rakyat maupun biksu Myanmar yang menjadi symbol kekuatan moral Myanmar itu sendiri. Adapun negosiasi yang dilakukan junta militer terhadap pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi diantaranya ialah mencari jalan solusi terhadap permasalahan kemrosotan ekonomi yang dialami Myanmar saat itu.

Hal inilah yang jelas lebih terlihat dan menjelaskan sesuai dengan teori transisi demokrasi karya Samuel P. Huntington diatas bahwa dalam proses transisi demokratisasi di Myanmar, elite yang berkuasa saat itulah yang mempelopori negosiasi dengan berbagai elemen masyarakat dan mempelopori terwujudnya demokrasi dalam hal ini terwujudnya pemilu pada akhir tahun 2010 yang secara sah terpilihnya Thein Sein menjadi pemimpin rezim baru Myanmar yang demokratis sebagai langkah awal transisi dari runtuhnya pemerintah tangan besi junta militer menuju

kebangkitan pemerintahan demokrasi di Myanmar yang demokratis.. Menyusul kemudian, dibebaskannya tokoh penting NLD Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah.

## **E. Hipotesa**

Faktor internal yang mendorong proses transisi demokratisasi di Myanmar tahun 2010 dipengaruhi oleh variabel :

- 1) Situasi kemunduran ekonomi domestik Myanmar cenderung merosot dan jauh dari kriteria stabil yang kemudian menyulut protes dua kekuatan aksi massa yakni para biksu dan aktivis NLD.
- 2) Kondisi instabilitas politik nasional seras akan konflik berupa konflik horizontal yang terjadi antara etnis dalam negara Myanmar dan konflik vertikal antara pihak pemerintah otoriter Myanmar dengan pihak oposisi yaitu LND dibantu LSM, golongan terpelajar serta masyarakat sipil partisipan dan biksu Myanmar.
- 3) Pergeseran cara pandang pemimpin elite politik pada masa kepemimpinan junta militer yang sangat jelas terlihat terutama pada kepemimpinan Jenderal Saw Maung, berlanjut pada kepemimpinan Jenderal Than Shwe yang membuka berbagai cara dalam jalan negosiasi terhadap berbagai elemen baik pihak oposisi NLD, rakyat, maupun biksu yang memelopori terwujudnya pemilu pada akhir tahun 2010 yang secara sah terpilihnya Thein Sein menjadi pemimpin rezim baru Myanmar yang demokratis.

## **F. Jangkauan Penelitian**



Penelitian ini mengambil rentang waktu penelitian mulai dari upaya proses transisi demokrasi melalui Pembentukan Peta Jalan Demokrasi (2003) sampai pemilihan umum pada bulan November tahun 2010 terpilihnya Thein Sein menjadi pemimpin rezim baru demokrasi di Myanmar. Namun dalam penulisan ini, tidak menutup kemungkinan penulis mengulas berbagai peristiwa dan menggunakan data-data pada tahun-tahun sebelumnya untuk kepentingan penelitian.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskripsi eksplanatoris yaitu menjelaskan dengan menggambarkan suatu fenomena dengan fakta-fakta yang aktual pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian memberikan penjelasan obyektif menurut fakta dan data yang tersedia, menghubungkan antar faktor sebagai unit analisis, dan menginterpretasikannya untuk mencapai kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder. Dimana teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka (*Library Research*) dengan bahan pustaka seperti buku, jurnal, buletin, surat kabar, serta media internet untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan relevan.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I. Pendahuluan**

Dalam bab ini mendeskripsikan mengenai alasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar berfikir, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

## **BAB II. Sejarah Berkuasanya Pemerintahan Militer Myanmar**

Pada bab ini menerangkan tentang gambaran umum sejarah dari berkuasanya pemerintahan militer Myanmar. Secara kronologis membahas dari proses sebelum berkuasanya, latar belakang berkuasanya, hingga kemudian munculnya dan berlangsungnya rezim otoriter di Myanmar. Seperti apa berkuasanya junta militer Myanmar akan dibahas dalam bab ini. Membahas bagaimana pemerintahan Myanmar berdasar kronologis dari model Sosialisme Gaya Burma, SLORC sampai SPDC dan bagaimana kebijakan-kebijakan rezim otoriter Myanmar.

## **BAB III. Pergulatan Menuju Demokratisasi di Myanmar**

Dalam bab ketiga ini menjelaskan tentang bagaimana pergulatan antara gerakan pro demokrasi yang menuntut transisi menuju demokratisasi di Myanmar dan pemerintahan rezim militer yang berusaha mempertahankan *status quo* –nya agar tetap bertahan. Serta membahas berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh junta militer dalam mempertahankan *status quo*.

## **BAB IV. Faktor – Faktor Pendorong Transisi Demokrasi di Myanmar**

Bab ini menjelaskan faktor-faktor yang mendorong transisi demokrasi di Myanmar. Membahas tentang situasi kemunduran ekonomi dan politik domestik Myanmar yang cenderung merosot dan jauh dari kriteria stabil menyulut protes dari dua kekuatan aksi massa yakni para biksu dan aktivis oposisi NLD dalam proses demokratisasi di Myanmar. Juga membahas peran dari komunitas regional kawasan ASEAN serta masyarakat Internasional yang begitu kuat memberikan kecaman, sanksi, baik sanksi politik & ekonomi terhadap kekerasan serta pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar oleh rezim junta militer dalam upaya berlangsungnya transisi menuju demokrasi di Myanmar.

## **BAB V. KESIMPULAN**

Dalam bab terakhir ini berisikan rangkuman atau kesimpulan yang merupakan intisari dari seluruh hal-hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang telah menjawab rumusan masalah yang telah diangkat penulis dalam skripsi ini.